



REVISI RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021 - 2026

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat-Nya, Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 150 ayat (3) huruf b dan 151 ayat (1) dan (2); bahwa OPD menyiapkan Rancangan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Rentra - OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI), menetapkan Renstra OPD setelah disesuaikan dengan RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2021-2026, agar dapat menjadi dasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima) tahun kedepan yang penyusunannya telah dan akan diselaraskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu.


Kami menyadari sepenuhnya bahwa Revisi Rencana Strategis yang telah disusun ini masih banyak kekurangan, namun ini merupakan langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kurun waktu lima tahun kedepan.

Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu ini, dibuat dengan tujuan :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan yang diberikan, sekaligus sebagai landasan operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menjadi terarah dan terukur pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memudahkan seluruh jajaran yang ada pada masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dengan cara

3. menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan selama lima tahun.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 hendaknya dapat memberikan umpan balik (*Feedback*) dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berkualitas, semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat digunakan oleh pihak–pihak (*stakeholder*) yang berkepentingan.

Putussibau, 1 November 2022
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Hj. ANA MARIANA. S.T. M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19670325 1997032 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistemmatika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	8
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	8
2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	13
2.3 Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas hulu	18
2.4 Kekuatan, Tantangan, Kelemahan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaen Kapuas Hulu.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Tujuan	36
4.2 Sasaran	36
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP.....	61

Daftar Tabel

Tabel 2.2.1	Komposisi Aparatur Sipil Negara	15
Tabel 2.2.1	Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Ruang	15
Tabel 2.2.3	Keadaan Sumber Daya Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.2.4	Keadaan Sarana dan Prasarana.....	17
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	21
Tabel 2.6	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	22
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi dan Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	31
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran	38
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Renstra BPPD.....	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dilaksanakan melalui satu proses pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya agar kegiatan pembangunan Negara Kesatuan Republik berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan satu perencanaan pembangunan Nasional. Proses perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, didasarkan pada beberapa aspek, antara lain kondisi geografis. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km²

10 kawasan daratan berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah . Pasal 3 :'(1) Di setiap daerah kabupaten / kota yang berbatasan dengan negara dibentuk BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) kabupaten / kota'.

Menindaklanjuti tugas dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Memperhatikan beberapa pertimbangan politik dan hukum pertimbangan di atas , maka lahirnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsinya :

1. Penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan perbatasan ;
2. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas
3. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan ;
4. Penjagaan dan Pemeliharaan tanda batas wilayah negara ;
5. Pelaksanaan bantuan fasilitas penegakan , Pemeliharaan , dan pengamanan batas wilayah negara dan
6. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi

Untuk melaksanakan fungsi yang diberikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah diperlukan satu pedoman, panduan dan dasar yang relevan. Pedoman tersebut selanjutnya kami tuang dalam **Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026**.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan satu konsep kolaborasi antara kepentingan Daerah dan Nasional serta aspek empiris lahirnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yakni sebagai implementasi dari keinginan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Aspek selanjutnya, Rencana Strategis disusun sebagai satu rangkaian dalam proses perencanaan pembangunan. Metode penyusunan rencana strategis dilaksanakan dengan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis serta perencanaan pembangunan strategis pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pasal (7)

Mekanisme dan kedudukan Rencana Strategis merupakan “suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Sementara “Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi”.

Sebagai satu proses dalam menentukan tindakan pada masa depan secara tepat, rencana strategis disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal, yakni: kekuatan (*strength*) dan kelemahan yang dimiliki (*weakness*) serta aspek eksternal, yakni: peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Dalam penyusunannya, “Renstra-SKPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif”.

Bertitik tolak aspek yuridis dan empiris, Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dibuat dengan mempertimbangkan: arah, strategis, kebijakan, program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, RPJM Nasional maupun serta dokumen perencanaan terkait lainnya, seperti Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra OPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026 ini dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Strategis merupakan kegiatan wajib yang harus dibuat sebagai dasar bagi setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis mempunyai peranan yang penting dalam menuntun instansi pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dilahirkan untuk menjadi satu dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun. Secara substansi, Materi Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Sebagai satu dokumen perencanaan, secara umum Rencana Strategis BPPD Kapuas Hulu merupakan implementasi atau penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih serta Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan . Bertitik dari dua kepentingan tersebut, Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan yang diberikan, sekaligus sebagai landasan operasional secara resmi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memudahkan seluruh jajaran yang ada pada masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
 PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

BPPD Kabupaten kapuas Hulu mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Menjaga dan memelihara tanda batas;
3. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis BPPD;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan BPPD dengan instansi lainnya ;Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang pengelola perbatasan ;
- f. Pembangunan reformasi birokrasi pada badan ;
- g. Pemantauan , pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Badan ;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati sesuai dengan Bidang tugasnya .

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kegiatan Sekretariat ;
- b. Pengkoordinasian , sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan ;
- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- e. Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan , aset , kebersihan dan keamanan kantor ;
- f. Penyelenggaran tata usaha persuratan , kearsipan dan perpustakaan ;
- g. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja , keprotokolan , pelayanan publik, informasi publik ,pengaduan masyarakat , hubungan masyarakat dan prosedur kerja ;
- h. Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan ;
- i. Pemantauan , pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat ;dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

A. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi Umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Badan . Subbagian umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan paratur;
2. Penyelenggaraan urusan penautasan surat menyurat ;
3. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian
4. Penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
5. Penyelenggaran urusan pengelolaan data pembangunan , keprotokolan , pelayanan publik , informasi publik , pengaduan masyarakat , hubungan masyarakat , prosedur kerja , perpustakaan dan kearsipan ;
6. Pemantauan , pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian Umum dan Aparatur fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. Penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- c. Perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. Perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- f. Pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;

- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bidang Koordinasi , Perencanaan dan Kerja Sama terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

2.1.4 Bidang Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Penyusunan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. Perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. Pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- j. Bidang Koordinasi Pelaksanaan ,Monitoring dan Evaluasi , terdiri dari kelompok jabatan Fungsional.

2.1.5 Unit Pelaksana Teknis

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional .pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Dalam masa transisi , bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan ,penyedeharnaan dan / atau penghapusan jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional,agar pelaksanaan kegiatan terlaksana secara optimal , dapat ditetapkan Tim Pelaksanaan Kegiatan untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kegiatan tertentu , sampai dengan ditetapkannya peraturan perundangan – undangan yang mengatur tentang mekanisme kerja ASN . Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan diatur tersendiri dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan satu organisasi perangkat daerah. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber-sumber yang ada. Sumber- sumber dimaksud, antara lain: Sumber Daya Manusia (*men*), Keuangan (*money*), Metode/perangkat, arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan (*methods*), perlengkapan (*materials*), peralatan/Mesin (*machine*), dan pemasaran (*market*)

Sumber Daya Manusia yang Tersedia di Kantor BPPD Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 23 orang Terdiri 13 orang Pegawai Negeri sipil dan 10 orang tenaga kontrak Sebagai bagian utama dalam organisasi, kami sajikan Komposisi Aparatur Sipil Negara di Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan / Ruang. data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1

Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN				Jumlah
PNS		TENAGA KONTRAK		
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
10	3	8	2	23

sumber: Subbagian umum dan Aparatur tahun 2023

Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
1	-	1	-	-	7	4	13

Sumber: : Subbagian umum dan Aparatur tahun 2023

Tabel 2.2.2

Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Ruang

GOLONGAN RUANGAN									Jumlah
II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
-	2	1	2	3	3	1	1		13

Sumber: : Subbagian umum dan Aparatur tahun 2023

Tabel 2.2.3

Keadaan Sumber Daya Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
2	-	-	3	-	5	-	1

Sumber: Subbagian umum dan Aparatur tahun 2023

2.2.1 Sumber Daya Keuangan

Selain Sumber Daya Manusia, sumber yang dianggap vital terhadap keberhasilan organisasi adalah Sumber daya keuangan Tahun 2023, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 2.626.603.617**

2.2.2 Sumber Daya Perlengkapan (sarana prasarana)

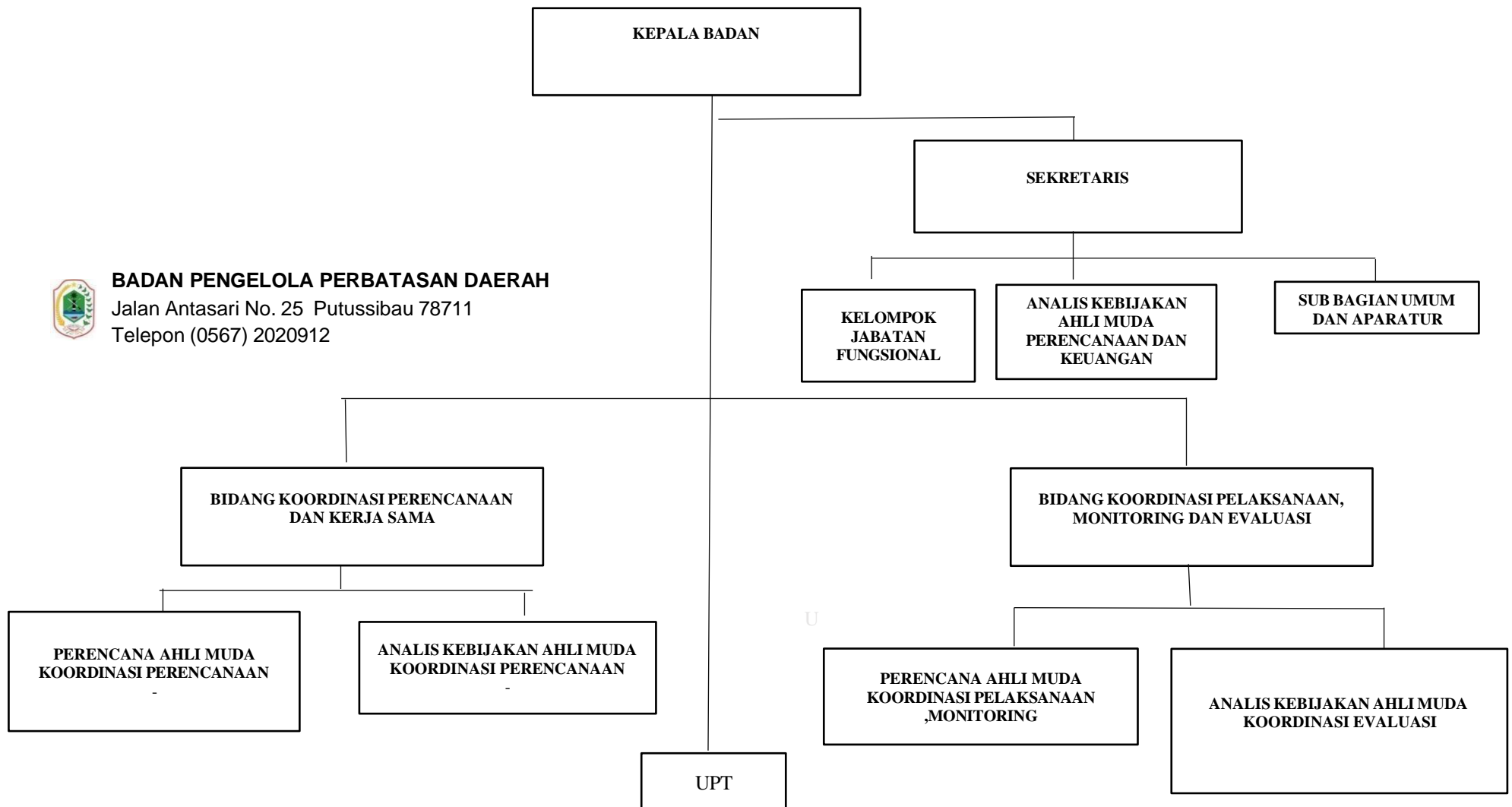
Selain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan yang dianggap vital terhadap keberhasilan organisasi, Sumber Daya Perlengkapan (sarana prasarana) juga merupakan faktor dominan dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. Adapun Sumber Daya Perlengkapan (sarana prasarana) pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu seperti terlihat pada table 2.2.4.

Tabel 2.2.4
Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor : a. Ruang Kerja b. Ruang Tamu c. Toilet	 8 0 1
2.	Kendaraan : a. Kendaraan Roda Dua b. Kendaraan Roda Empat	 10 unit 2 unit
3.	Sarana Pendukung dan Perlengkapan lainnya : a. Komputer b. Mesin Tik c. Pesawat Telepon/Faximile d. Kursi Putar e. Meja Rapat f. Kursi Rapat g. Printer h. Meja Kerja 1 Biro i. Meja Kerja 1/2 Biro j. Kursi Kerja Pegawai Non Struktur	 12 0 0 12 2 15 10 Unit 2 Unit 20 Unit 20 Buah

Sumber: Subbagian umum dan Aparatur tahun 2023

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



2.3. Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unit kerja pendukung yang membantu dalam merumuskan rencana pengembangan daerah perbatasan baik bersifat jangka panjang maupun tahunan, untuk kemudian di implementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD (Kabupaten dan Provinsi) serta APBN.

Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .

Strategi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk membangun disegala bidang melalui misi ke dua dan keempat Bupati/ Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan kapuas hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan berazaskan efektifitas dalam penetapan kebijakan daerah pada program pembangunan perbatasan, efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan, efektifitas dalam fasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan, efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan Kawasan Perbatasan.

Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan daerah terukur melalui indikator-indikator pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi: Persentase dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Persentase dokumen Fasilitasi Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan, Persentase dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah, Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD, Persentase pemenuhan data kepegawaian, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal, Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah, Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5. serta untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja

Perangkat Daerah

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	C	CC	B	B	BB	CC	-	-	-		C	CC	B	B	BB
2	Jumlah dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas	-	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen
3	Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana aksi dan fasilitasi kerjasama serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Pembangunan kawasan perbatasan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke....(%)					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
				2020	2021				2020	2021				2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	-	44.665.000	-	-	-	-	41.794.400	-	-	-	-	93,57%	-	-	-
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	-	-	-	35.495.600	-	-	-	-	34.906.990	-	-	-	-	98,34%	-	-	-
Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Profil kawasan Perbatasan	-	-	-	43.598.000	-	-	-	-	41.973.000	-	-	-	-	96,27%	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sinkronisasi Dan Harmonisasi Program Kegiatan	-	-	-	13.832.320	-	-	-	-	13.831.269		-	-	-	98,98%	-	-	-
Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	-	-	-	45.896.730	-	-	-	-	45.751.730	-	-	-	-	99,68%	-	-	-
Seminar Tentang Pengelola Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.794.697.750	2.529.223.839,00	-	-	-	2.622.828.884	2.476.120.975,00	-	-	-	93,85%	97,86 %	-	-

Catatan :

2.4. Kekuatan, Tantangan, Kelemahan Dan Peluang Pengembangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dituntut untuk menjadi abdi masyarakat yang profesional dan berkualitas, hal ini seiring dengan meningkatnya kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang mendorong percepatan dalam pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan, sehingga Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai Unsur dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan daerah di bidang monitoring kawasan perbatasan dan bina kerjasama memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu optimis dalam peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah bidang monitoring kawasan perbatasan dan bina kerjasama. Hal ini merujuk dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 2. Sumber anggaran yang dialokasikan dalam APBD dan APBN;
 3. Sumber Daya Aparatur dengan latar belakang pendidikan dan dukungan yang tersedia di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Tantangan yang diprediksi akan dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Pesatnya arus globalisasi yang menuntut perubahan dan penyesuaian secara cepat sehingga butuh kesiapan dan kompetensi yang memadai dalam proses perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan;
2. Masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap peran dan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Tingginya dinamika situasi keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan terkait arus ekonomi
4. Minimnya sarana dan prasarana di wilayah Perbatasan seperti sarana dan prasarana kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi;
5. Lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah.

Kelemahan yang merupakan penyebab kurang tercapainya penyelenggaraan pengembangan pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Belum optimalnya dukungan teknologi data dan informasi yang memadai;
2. Masih belum tersedia ketentuan dan peraturan pelaksana yang optimal dalam aplikasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
3. Belum tersedianya sumber daya aparatur utamanya yang berbasis pada keterampilan GIS, Analisa Tata Ketataprajaan, Analisa Kerjasama, Analisa Data dan Informasi;
4. Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Terdapat beberapa Peluang yang mungkin dapat di upayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan kinerja Badan Paengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Adanya Perundangan-undangan dan peraturan yang terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Adanya Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sehingga dapat mendukung kelancaran proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Adanya Peluang Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri.
4. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan program/kegiatan baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya kerap dihadapkan pada berbagai persoalan, dan diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan disebut sebagai isu strategis.

Pengertian isu strategis secara umum adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

3.1.1 Faktor Internal

Sumber-sumber internal organisasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat menjadi faktor kekuatan sekaligus sebagai sumber kelemahan terdiri dari Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kebijakan program dan kegiatan, peralatan/sarana dan prasarana. *Sumber Daya Manusia* yang sudah tersedia pada prinsipnya telah dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, namun secara kuantitatif dan secara kualitatif SDM yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan yang sesuai, sehingga belum optimal dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi yang dibebankan.

Sumber daya keuangan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berkenaan dengan alokasi anggaran yang tersedia saat ini telah dapat menggerakkan dan memberdayakan organisasi, namun belum sepenuhnya alokasi anggaran tersebut mampu memaksimalkan kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kebijakan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang telah terbentuk dan telah dituangkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021 - 2026 dan secara keseluruhan telah memaparkan terkait Arah Kebijakan, Strategi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sumber daya Perlengkapan, sarana prasarana sebagai pendukung pencapaian kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada prinsip nya telah tersedia, sehingga memungkinkan bagi seluruh pelaku yang ada untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan, berdasarkan data terakhir yang terinventarisir bahwa peralatan/perlengkapan yang tersedia di Badan Pengelola Perbatasan telah dapat menggerakkan Organisasi dan perangkatnya, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan standar sarana/prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan dan kenyamanan kerja.

3.1.2 Faktor Eksternal

Secara umum faktor eksternal yang diidentifikasi sebagai peluang dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah;
2. Dinamika hubungan kerja yang harmonis dengan sesama perangkat daerah dan dengan instansi teknis lainnya, dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan elemen masyarakat lainnya;;
3. Adanya RPJMD Kabupaten, hasil Musrenbang dan forum SKPD, serta adanya Nomenklatur Program Kegiatan untuk panduan SKPD;
4. Kepemimpinan daerah yang legitimate;
5. Kondisi dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang kondusif;
6. Terjalannya komunikasi dan hubungan kerja yng erat dengan pimpinan daerah;

7. Jumlah penduduk yang relatif kecil dengan struktur masyarakat yang sederhana.

Dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, merumuskan ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Potensi ancaman yang akan dihadapi dan bersumber dari dalam negeri, antara lain:
 - a. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
 - b. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga dapat memicu persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain.
 - c. Pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
 - d. Potensi konflik antar kelompok baik perbedaan pendapat dalam politik, dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA
 - e. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional
 - f. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah.
2. **Beberapa ancaman yang bersumber dari luar negeri, antara lain:**
 - a. **Ancaman terhadap ideologi** merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini.
 - b. **Ancaman terhadap politik** dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila.

- c. **Ancaman terhadap ekonomi** seperti semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Contoh sikap lebih menyukai produksi luar negeri, hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi.
- d. **Ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya** alam melalui eksploitasi SDA yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti ilegal logging, ilegal fishing, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang.
- e. **Ancaman terhadap sosial budaya** misalnya dengan upaya menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi kebudayaan leluhur bangsa Indonesia.
- f. **Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan** antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu gerakan sparatis, dan sebagainya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai perwujudan dari pernyataan, ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu harus dibawa, dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, atau dengan kata lain visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 adalah **“MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada serta tantangan lima tahun mendatang, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termasuk kedalam urusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah misi ke 2 dan 4 yaitu “

- a. **Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;**
- b. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas”.**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditunjukkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri Pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dan memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra K/L BNPP, baik dalam tatanan kebijakan, strategis, Program maupun kegiatan.

Tabel 3.1

**Keterkaitan Visi dan Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan
dengan Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

VISI BNPP	MISI BNPP	KETERKAITAN BPPD KH DENGAN VISI DAN MISI BNPP
Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara sebagai Halaman Depan Negara yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya efektifitas dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan	1. Meningkatnya efektifitas dalam penetapan kebijakan daerah dalam program pembangunan perbatasan
	2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara	2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara
	3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara	3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan

	4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara	4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Kawasan Perbatasan
--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu kaitanya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor- faktor rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah hubunganya dengan RTRW dan KLHS, Badan Pengelola Perbatasan Daerah terkait secara langsung pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Program-program tersebut perlu mendapat perhatian baik secara langsung ataupun tidak langsung karena dapat menimbulkan pengaruh terhadap issue yang bernilai negatif terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya sampai dengan tahun 2026. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi pada masa-masa yang akan datang. informasi tersebut dijadikan dasar dalam membuat arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Badan Pengelola Perbatasan pada tahun-tahun mendatang. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi:

A. Isu Eksternal (Nasional dan Regional)

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, kawasan perbatasan memerlukan penanganan secara khusus sehingga mampu memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara serta hak-hak berdaulat. Penanganan kawasan perbatasan sebaiknya tidak dipandang sebagai “**Halaman Belakang Dan Pinggiran**”, melainkan halaman depan negara yang penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus.

Hasil kajian yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Nasional 2021-2026, ada beberapa isu strategis yang mendorong munculnya berbagai persoalan yang di perbatasan. isu tersebut adalah:

1. Dimensi pengelolaan batas wilayah

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama pada pengelolaan batas wilayah adalah:

- a. Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- b. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- c. Pada Dimensi pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara

2. Dimensi pengelolaan lintas negara

Isu strategis yang harus menjadi perhatian utama pada pengelolaan lintas negara meliputi:

- a. **Dimensi ekonomi** lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (LOKPRI) terhadap negara tetangga maupun PKSN; Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara, adanya ketergantungan masyarakat di lokpri terhadap negara tetangga, belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community pada tahun 2015.

- b. Isu strategis pada **Dimensi pertahanan dan keamanan**, di antaranya maraknya kegiatan ilegal di LOKPRI akibat lemahnya pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat
- c. Isu strategis di **bidang sosial budaya**: belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di LOKPRI; serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan.

3. Dimensi pembangunan kawasan perbatasan

Isu strategis pada pembangunan kawasan perbatasan, yaitu:

- a. rendahnya **pelayanan infrastruktur transportasi regional** (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan. Isu strategis **penataan ruang** kawasan perbatasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan.
- b. Pada Dimensi **pertumbuhan ekonomi** kawasan perbatasan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:
 - ✓ belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan di Lokasi Prioritas,
 - ✓ sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di lokpri, belum optimal.
 - ✓ lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
 - ✓ lemahnya sistem regulasi yang seharusnya mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan;
- c. Pada Dimensi pelayanan sosial dasar kawasan, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama, di antaranya:
 - ✓ minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di LOKPRI.
 - ✓ Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di LOKPRI
- d. Rendahnya SDM di LOKPRI akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM di LOKPRI
- e. Belum optimalnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan.
- F. Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan.

4. Dimensi Kelembagaan

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:

- a. belum optimalnya mekanisme pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- b. Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antar negara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga
- c. Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan;

B. Isu Internal (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu)

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, Badan Pengelola perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; matrik rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan belum sepenuhnya terealisasi;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; lemahnya regulasi atau kewenangan BPPD dalam pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan;
3. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; lemahnya koordinasi dan regulasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara
4. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi; belum adanya kajian ilmiah tentang potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di daerah kapuas hulu

4.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan di atas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan program pembangunan perbatasan daerah dalam sasaran (s) strategis sebagai indikator pencapaian hasil, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
2. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kapuas Hulu

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 4.1. sebagai berikut

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(1) 2022	(2) 2023	(3) 2024	(4) 2025	(5) 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	CC	CC	B	BB	BB
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kapuas Hulu	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	2 Doku men	3 Doku men	4 Doku men	5 Doku men	6 Doku men

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Adapun Strategi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan;
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka Fasilitasi Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
4. Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
5. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kebijakan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan. kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya yang terdiri dari dana, personil, sarana dan prasarana serta waktu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi :

1. Memberikan petunjuk prinsip - prinsip, rambu - rambu dan signal - signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

Adapun arah kebijakan yang ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
3. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan;

4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
5. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah
11. Melaksanakan Penyediaan Jasa pada Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1.
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PADA RENSTRA BPPD

VISI RPJMD :	Terwujudnya Kapuas Hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil		
MISI 2 :	Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;		
MISI 4 :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.1.1. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada Badan pengelola Perbatasan daerah	1.1.1.1. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Badan pengelola Perbatasan daerah
			1.1.1.2 Melaksanakan Administrasi keuangan Pada Badan pengelola Perbatasan daerah
			1.1.1.3 Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Badan pengelola Perbatasan daerah
			1.1.1.7 Melaksanakan

			administrasi Kepegawaian perangkat daerah
			1.1.1.5 Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah
			1.1.1.6. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah
			1.1.1.7. Melaksanakan penyediaan jasa pada perangkat daerah
			1.1.1.8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di daerah Kapuas hulu	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi kawasan perbatasan di kecamatan Lokasi prioritas kawasan perbatasan	2.1.1 Penyediaan Dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan perbatasan di kecamatan lokasi Prioritas	2.1.1.1 Melaksanakan Pendataan Pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan
		2.1.2 Meningkatkan Dokumen Perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan	2.1.1.2 Melaksanakan Koordinasi penyusunan rencana aksi dan fasilitasi kerja sama serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing - masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing - masing pagu menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah							Predikat Sakip BPPD	B	CC		CC		B		B		BB		BB		Kepala BPPD	BPPD
		5	6				Pengelolaan Perbatasan	Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	97,86%	100%	2.805.674.020	100%	2.805.674.020	100%	2.805.674.020	100%	2.805.674.020	100%	2.805.674.020	100%	2.805.674.020		BPPD
		5	6	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		97,77%	100%	2.404.773.839	100%	2.404.773.839	100%	2.404.773.839	100%	2.404.773.839	100%	2.404.773.839	100%	2.404.773.839	Sekretaris	BPPD
								Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	97,86%	98,80%		98,80%		98,90%		99,00%		99,00%		99,10%		Sekretaris	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100%	100%			100%			100%			100%		100%			Sekretaris	BPPD
								Persentase pemenuhan data kepegawaian	100%	100%			100%			100%			100%		100%			Sekretaris	BPPD
								Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	77%	80%			80%			85%			88%		90%			Sekretaris	BPPD
								Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%			100%			100%			100%		100%			Sekretaris	BPPD
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%			100%			100%			100%		100%			Sekretaris	BPPD
								Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	100%			100%			100%			100%		100%			Sekretaris	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.058.000	8 Dokumen	10.631.000	8 Dokumen	4.175.000	8 Dokumen	4.175.000	8 Dokumen	4.175.000	8 Dokumen	4.175.000	40 Dokumen	27.331.000	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.793.000	2 Dokumen	3.057.000	2 Dokumen	815.000	2 Dokumen	815.000	2 Dokumen	815.000	2 Dokumen	815.000	10 Dokumen	6.317.000	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.425.000	1 Dokumen	3.057.000	1 Dokumen	835.000	1 Dokumen	835.000	1 Dokumen	835.000	1 Dokumen	835.000	5 Dokumen	6.397.000	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.540.000	1 Dokumen	3.057.000	1 Dokumen	775.000	1 Dokumen	775.000	1 Dokumen	775.000	1 Dokumen	775.000	5 Dokumen	6.157.000	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.490.000	1 Dokumen	730.000	1 Dokumen	775.000	1 Dokumen	775.000	1 Dokumen	775.000	1 Dokumen	775.000	5 Dokumen	3.830.000	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.810.000	3 Doku- men	730.000	1 Doku- men	975.000	1 Doku- men	975.000	1 Doku- men	975.000	1 Doku- men	975.000	5 Doku- men	4.630.000	Kasub- bag Progra m dan Keuan g-an	BPPD
		5	6	1	2,02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.640.367.684	18 Doku- men	1.623.770.372	18 Doku- men	1.712.100.917	18 Doku- men	1.712.100.917	18 Doku- men	1.712.100.917	18 Doku- men	1.712.100.917	90 Doku- men	8.472.174.040	Kasub- bag Progra m dan Keuan g-an	
		5	6	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	1.516.911.684	14 Doku- men	1.521.464.550	14 Doku- men	1.566.290.917	14 Doku- men	1.566.290.917	14 Doku- men	1.566.290.917	14 Doku- men	1.566.290.917	14 Doku- men	7.786.628.218	Kasub- bag Progra m dan Keuan g-an	BPPD
		5	6	1	2,02	3	Pelaksanaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	107.340.000	2 Doku- men	99.300.222	2 Doku- men	144.150.000	2 Doku- men	144.150.000	2 Doku- men	144.150.000	2 Doku- men	144.150.000	2 Doku- men	675.900.222	Kasub- bag Progra m dan Keuan g-an	BPPD
		5	6	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.925.000	1 Doku- men	1.505.600	1 Doku- men	850.000	1 Doku- men	850.000	1 Doku- men	850.000	1 Doku- men	850.000	1 Doku- men	4.905.600	Kasub- bag Progra m dan Keuan g-an	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.191.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	810.000	1 Dokumen	810.000	1 Dokumen	810.000	1 Dokumen	810.000	1 Dokumen	4.740.000	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.125.000	2 Dokumen	28.850.000	2 Dokumen	45.450.000	2 Dokumen	45.450.000	2 Dokumen	45.450.000	2 Dokumen	45.450.000	10 Dokumen	210.650.000	Kasub-bag Umum dan Aparatur	
		5	6	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.000.000	1 Dokumen	12.600.000	1 Dokumen	29.200.000	1 Dokumen	29.200.000	1 Dokumen	29.200.000	1 Dokumen	29.200.000	5 Dokumen	129.400.000	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.125.000	1 Dokumen	16.250.000	1 Dokumen	16.250.000	1 Dokumen	16.250.000	1 Dokumen	16.250.000	1 Dokumen	16.250.000	5 Dokumen	81.250.000	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.075.270	4 Dokumen	471.431.878	4 Dokumen	288.739.700	4 Dokumen	288.739.700	4 Dokumen	288.739.700	4 Dokumen	288.739.700	20 Dokumen	1.626.390.678	Kasub-bag Umum dan Aparatur	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.531.000	1 Dokumen	9.109.678	1 Dokumen	2.180.000	1 Dokumen	2.180.000	1 Dokumen	2.180.000	1 Dokumen	2.180.000	5 Dokumen	17.829.678	Kasubag Umum dan Aparatur	BPPD	
		5	6	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.787.200	1 Dokumen	61.482.200	1 Dokumen	24.718.700	1 Dokumen	24.718.700	1 Dokumen	24.718.700	1 Dokumen	24.718.700	5 Dokumen	160.357.000	Kasubag Umum dan Aparatur	BPPD	
		5	6	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000	1 Dokumen	15.670.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	55.670.000	Kasubag Umum dan Aparatur	BPPD	
		5	6	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.257.070	1 Dokumen	385.170.000	1 Dokumen	251.841.000	1 Dokumen	251.841.000	1 Dokumen	251.841.000	1 Dokumen	251.841.000	5 Dokumen	1.392.534.000	Kasubag Umum dan Aparatur	BPPD	
		5	6	1	2,07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	27.918.000	2 Dokumen	28.760.000	2 Dokumen	25.075.000	2 Dokumen	53.835.000	2 Dokumen	53.835.000	2 Dokumen	53.835.000	10 Dokumen	215.340.000	Kasubag Umum dan Aparatur		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat -kat Daerah h Penan g-gung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,07	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.918.000	1 Doku- men	28.760.000	1 Doku- men	0	1 Doku- men	28.760.000	1 Doku- men	28.760.000	1 Doku- men	28.760.000	1 Doku- men	115.040.000	Kasub- bag Umum dan Aparat ur	BPPD
		5	6	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	25.075.000	1 Doku- men	25.075.000	1 Doku- men	25.075.000	1 Doku- men	25.075.000	1 Doku- men	100.300.000	Kasub- bag Umum dan Aparat ur	BPPD
		5	6	1	2,08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.129.864	2 Doku- men	381.649.770	2 Doku- men	361.208.800	2 Doku- men	361.208.800	2 Doku- men	361.208.800	2 Doku- men	361.208.800	10 Doku- men	1.826.484.970	Kasub- bag Umum dan Aparat ur	
		5	6	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.437.864	1 Doku- men	27.000.000	1 Doku- men	37.743.640	1 Doku- men	37.743.640	1 Doku- men	37.743.640	1 Doku- men	37.743.640	5 Doku- men	177.974.560	Kasub- bag Umum dan Aparat ur	BPPD
		5	6	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.692.000	1 Doku- men	354.649.770	1 Doku- men	323.465.160	1 Doku- men	323.465.160	1 Doku- men	323.465.160	1 Doku- men	323.465.160	5 Doku- men	1.648.510.410	Kasub- bag Umum dan Aparat ur	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.680.000	2 Dokumen	72.346.500	2 Dokumen	61.516.500	2 Dokumen	61.516.500	2 Dokumen	61.516.500	2 Dokumen	61.516.500	10 Dokumen	318.412.500	Kasub-bag Umum dan Aparatur	
		5	6	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.650.000	1 Dokumen	64.316.500	1 Dokumen	53.486.500	1 Dokumen	53.486.500	1 Dokumen	53.486.500	1 Dokumen	53.486.500	5 Dokumen	278.262.500	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	5 Dokumen	40.150.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di daerah kapuas hulu	Meningkatnya pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di daerah kapuas hulu						Program Pengelolaan Perbatasan	Jumlah dokumen Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan		2 Dokumen		3 Dokumen		4 Dokumen		5 Dokumen		6 Dokumen				Kepala BPPD	BPPD
								Melaksanakan Koordinasi penyusunan rencana aksi dan fasilitasi kerjasama serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan negara di daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kepala BPPD	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perang kat Daerah Penang-gung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2				Dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan	1 Dokumen	1 Doku men	150.620.000	1 Doku men	38.685.400	100%	30.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	269.305.400	Kabid Koordi nasi Perenc anaan dan Kerjasama		
								Persentase Fasilitasi Kerja Sama yang terkoordinasi	100%	100%		100%	26.552.500	100%	30.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	106.552.500	Kabid Koordi nasi Perenc anaan dan Kerjasa ma	BPPD	
								Persentase capaian pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan		100%		100%	19.400.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	79.400.000	Kabid Koordi nasi Pelaksa naan, Monito ring dan Evalua si	BPPD	
								Persentase Capaian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		100%		100%	40.729.800	100%	40.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	140.729.800	Kabid Koordi nasi Pelaksa naan, Monito ring dan Evalua si	BPPD	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2	2,01			Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	40.595.000	3 Doku men	80.320.000	2 Doku men	65.237.900	2 Doku men	65.237.900	2 Doku men	65.237.900	2 Doku men	65.237.900	11 Doku men	381.866.600	Kabid Koordi nasi Perenc anaan dan Kerjasa ma	BPPD
		5	6	2	2,01		1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan	40.595.000	2 Doku men	40.170.000	1 Doku men	26.552.500	1 Doku men	30.000.000	1 Doku men	25.000.000	1 Doku men	25.000.000	6 Doku men	1873.317.500	Kabid Koordi nasi Perenc anaan dan Kerjasa ma	BPPD
		5	6	2	2,01		2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	0	1 Doku men	40.150.000	1 Doku men	38.685.400	1 Doku men	30.000.000	1 Doku men	25.000.000	1 Doku men	25.000.000	5 Doku men	158.835.400	Kabid Koordi nasi Perenc anaan dan Kerjasa ma	BPPD
		5	6	2	2,02			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	41.550.000	2 Doku men	60.129.800	2 Doku men	30.750.000	2 Doku men	40.000.000	2 Doku men	40.000.000	2 Doku men	40.000.000	12 Doku men	212.429.800	Kabid Koordi nasi Pelaksa naan, Monito ring dan Evalua si	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perang -kat Daerah Penan g-gung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2	2,02	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan	41.550.000	1 Doku- men	35.150.000	1 Doku- men	19.400.000	1 Doku- men	19.400.000	1 Doku- men	19.400.000	1 Doku- men	0	5 Doku- men	99.750.000	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD
		5	6	2	2,02	2	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	5 Doku- men	0	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD
		5	6	2	2,02	3	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Dokumen Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	11.350.000	1 Doku- men	20.000.000	1 Doku- men	20.000.000	1 Doku- men	0	5 Doku- men	51.350.000	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2	2,02	4	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas N e g a r a	Dokumen Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas N e g a r a	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	11.350.000	1 Doku- men	20.000.000	1 Doku- men	20.000.000	1 Doku- men	20.000.000	5 Doku- men	0	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD	
		5	6	2	2,02	5	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten Kapuas hulu	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kab. Kapuas hulu	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	5 Doku- men	0	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD	
		5	6	2	2,03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.755.000	3 Doku- men	35.150.000	1 Doku- men	29.379.800	1 Doku- men	20.000.0000	1 Doku- men	10.000.000	1 Doku- men	10.000.000	6 Doku- men	146.284.800	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan -(2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2	2,03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.755.000	2 Doku- men	35.150.000	2 Doku- men	29.379.800	2 Doku- men	29.379.800	2 Doku- men	29.379.800	2 Doku- men	0	10 Doku- men	165.044.400	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD
		5	6	2	2,03	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	1 Doku- men	0	5 Doku- men	0	Kabid Koordi- nasi Pelaksa- naan, Monito- ring dan Evalua- si	BPPD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;

3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				(Tahun 1) 2022	(Tahun 2) 2023	(Tahun 3) 2024	(Tahun 4) 2025	(Tahun 5) 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Jumlah Dokumen Program Pengelolaan Perbatasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Fasilitas Kerjasama yang Terkoordinasi	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Capaian Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Capaian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6									
7	Predikat SAKIP BPPD	Score	29,5%	35%	60%	65%	70%	75%	75%
8	Nilai SAKIP BPPD	Predikat	D	CC	CC	B	BB	BB	BB

9	Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	%	98,6%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%
10	Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase pemenuhan data kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
13	Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah), sinergitas antar sektor, keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, maka Rencana Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disusun ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berdasarkan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran pada unit organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penegelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Kapuas Hulu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2031.